



# Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Kota Ternate)

Muhammad Iqra Harun<sup>1✉</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Univ. Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia,  
e-mail : [m\\_iqraharun@gmail.com](mailto:m_iqraharun@gmail.com)

Vol.	No.
<b>1</b>	<b>1</b>
Hal : 83 - 99	
Artikel Penelitian	

### Info. Artikel:

Di terima : 21 Mei 2021

Di revisi : 11 Juni 2021

DI Publikasi : 16 Juni 2021

### ✉Koresponden Author :

**Muhammad Iqra Harun**

e-mail : [m\\_iqraharun@gmail.com](mailto:m_iqraharun@gmail.com)

Univ. Muhammadiyah  
Maluku Utara  
Ternate-Indonesia



Copyright©

J-SSH-Juni 2021

### Abstrak.

Penelitian ini pada bulan Mei – Agustus 2020, di Kota Ternate dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling pada populasi sebanyak 93 orang yang berasal dari 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Kota Ternate menggunakan analisis regresi linier berganda dengan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian didapat bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yang artinya H1 ditolak. Hal ini masih terdapat kelemahan atau kurangnya pemahaman terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan; kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan; akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan ; dan penerapan standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ), kompetensi aparatur ( $X_2$ ) dan akuntabilitas ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

**Keyword :** Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur , Akuntabilitas, Informas, Laporan Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010:297)

Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. (Mardiasmo, 2002). Selain itu, menurut Mardiasmo (2004:29) juga

menyebutkan bahwa Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja pemerintahan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri. Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan (Dina Afrina, 2015).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga berdampak pada perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem-sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik (Soetjipto dan Sudikdiono, 211: 15 dalam Fitriadi 2013). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantarno dan Azlina, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang kompeten, namun sudah menjadi permasalahan umum diinstansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personal, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap) dari aspek kualitas penataan personal yang dilakukan kerap kali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*" (orang yang tepat ditempat yang tepat). Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumber daya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003).

Menurut Udiyanti et al (2014) Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi, dan persyaratan hutang. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015).

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti et al, 2014).

Maraknya fenomena mengenai pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyajikan data-data yang tidak sesuai dan juga masih banyaknya penyimpanan-penyimpanan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, akhirnya membuat publik bertanya-tanya tentang kinerja pemerintah yang dalam prakteknya masih minim dalam hal pertanggungjawaban dan menyebabkan publik kemudian menuntut agar penyelenggaraan pemerintah yang baik (Irvan Ahsani, 2016). Dari berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan yang telah dijelaskan diatas, tentu ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan buruknya kompetensi aparatur yang mumpuni (mampu

melaksanakan tugas dengan baik), serta kurangnya peran audit internal, sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk diberbagai pemerintah daerah terus terjadi dan berlanjut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disebabkan tiga faktor, antara lain: pertama kurangnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kedua minimnya kompetensi aparatur, ketiga lemahnya peran audit internal. (Irvan Ahsani, 2016).

Penelitian terkait dengan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran internal audit terhadap laporan keuangan juga pernah dilakukan oleh permana (2011), tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan imlikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Satandar Akuntansi Pemerintah signifikan dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Demikian penelitian dari Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai kompetensi aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan oleh Ikin Solihin dan Memen Kustiawan (2012) menegaskan bahwa pemberdayaan aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, laen halnya dengan penelitian yang dilakuakan Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian tentang peran audit internal juga telah dilakukan oleh Nugraha dan Susanti (2010) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasih laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian M. Ali Fikri Biana, dkk (2016), dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Auidit Internal Terhadap Informasi Laporan Keuangan (Study Pada SKPD Pemprov NTB). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya yaitu objek penelitian, kemudian Variabel Independen Peran Audit Internal dari penelitian sebelumnya peneliti mengubahnya dengan Akuntabilitas, dan penelitian sebelumnya menggunakan Variabel Moderating, sedangkan peneliti menggunakan Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan latar belakang tersebut serta beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada 31 SKPD Kota Ternate)”.

### 1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi serta memperkaya khasanah ilmiah dan sebagai bahan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Agustus 2020, di Kota Ternate dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* dengan jumlah poplasi sebanyak 93 orang yang berasal dari 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Kota Ternate. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan koesioner. Koesiener diantarkan langsung ke alamat responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan koesioner harus di isi oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan staf SKPD yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah dengan pengisian secara tertutup. Untuk mengukur skor data dari variabel-variabel atas menyajikan kuesioner menggunakan *skala likert*. Masing-masih jawaban dari setiap pilihan pernyataan akan diberikan skor atau bobot nilai sebagai berikut:

<u>Pilihan Jawaban</u>	<u>Skor/Bobot</u>
Sangat Setujuh	5
Setujuh	4
Kurang Setujuh	3

Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Pengukuran variabel dilakukan dalam bentuk skoring menggunakan skala likert. Hasil data skoring yang diperoleh dari responden akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan *IMB SPSS 16 for windows*.

## 2.1. Analisis Data

### 2.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran/ deskripsi suatu data yang dilihat dari rata – rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, Minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).

### 2.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik, yaitu terdiri dari :

#### 2.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data normal maka garis akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2011). Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah dimana model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogrov-Smirnov test* dengan kriteria pengujian  $\alpha$  0,05 sebagai berikut:

- Jika  $sig \geq \alpha$  berarti data sampel yang diambil terdistribusi normal
- Jika  $sig \leq \alpha$  berarti data sampel yang diambil tidak terdistribusi normal

#### 2.1.4. Uji Multikolinearitas

Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2011). Pengujian Multikolinieritas menggunakan *Variance Inflationfactor* (VIF) dengan kriteria yaitu:

- Jika angka *tolerance* dibawah 0,10 dan  $VIF > 10$  dikatakan terdapat gejala multikolinieritas
- Jika angka *tolerance* diatas angka 0,10 dan  $VIF < 10$  dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

#### 2.1.5. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t - 1$ . Uji durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen . Hipotesis yang akan diuji adalah  $H_0 =$  tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ ), dan  $H_a =$  ada korelasi ( $r \neq 0$ ) (Ghozali, 2006).

#### 2.1.6. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteros-kedastisitas pada penelitian ini menggunakan *Glejser Test*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $sig > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011)

## 2.2. Metode Analisis

Metode analisis penelitian ini adalah regresi linear berganda yaitu menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui bentuk hubungan yang

disebabkan oleh dua variabel dependen (X1 , X2) terhadap variabel dependen (Y) , maka digunakan metode analisis regresi berganda. Ghozali (2011:13).

Model persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$$

Dimana :

- Y = Kualitas Informasih laporan keuangan
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Slope atau koefisien regresi
- X1 = Standar Akuntansi Pemerintah
- X2 = Kompetensi Aparatur
- X3 = Akuntabilitas
- $\epsilon$  = Variabel Pengganggu

## 2.2. Pengujian Hipotesis

### 2.2.1. Uji Parsial (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikan yang digunakan adalah signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011).

### 2.2.2. Uji Simultan (uji f)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2011).

### 2.2.3. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R2* ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (*Adjusted R2* = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila *Adjusted R2* = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila *Adjusted R2* = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. (Ghozali, 2011).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

#### 3.1.1. Statistik Deskriptif

Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum responden, seperti jenis kelamin, umur responden, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden yang disajikan dalam bentuk frekuensi (Presentase). Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis statistik yang memperhitungkan *IMB SPSS 26 for windows*. Selanjutnya akan diuraikan karakteristik responden pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Frekuensi (40)	Presentase (%)
Jenis Kelamin ;		
1. Pria	12	30%
2. wanita	28	70%
Umur ;		
1. 24-30		
2. 31-38	7	17%

3.	39-45	23	57%
4.	46-53	10	25%
5.	>54		
Pendidikan ;			
1.	SMA		
2.	D3		
3.	S1	30	75%
4.	S2	10	25%
5.	S3		

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin responden tabel 4.2 menunjukkan bahwa Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkungam Pemerintahan Kota Ternate yang mendominasi berjenis kelamin wanita sebanyak 28 orang atau 70%. Responden dikelompokan berdasarkan usia 31-38 sebanyak 7 orang atau 17%, 39-45 sebanyak 23 orang atau 57%, dan 46-53 sebanyak 10 orang atau 25%. Selanjutnya responden berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak adalah S1 berjumlah 30 orang atau 75%, dan S2 10 orang atau 25%.

### 3.1.2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikannya kurang dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Dari 33 pertanyaan yang diajukan kepada responden, kemudian dikelompokan sesuai dengan variabel yang diuji. Untuk variabel X<sub>1</sub> (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah) terdapat 7 pertanyaan, variabel X<sub>2</sub> (Kompetensi Aparatur) terdapat 9 pertanyaan, variabel X<sub>3</sub> (Akuntabilitas) terdapat 9 pernyataan, dan variabel Y (Kualitas Informasi Laporan Keuangan) terdapat 8 pertanyaan. Berikut hasil uji validitas dari variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (X<sub>1</sub>)

Item	Person Corelation	Signifikan	Status
X <sub>1</sub>	0.836	0.000	Valid
X <sub>2</sub>	0.766	0.000	Valid
X <sub>3</sub>	0.765	0.000	Valid
X <sub>4</sub>	0.782	0.000	Valid
X <sub>5</sub>	0.847	0.000	Valid
X <sub>6</sub>	.0.448	0.004	Valid
X <sub>7</sub>	0.740	0.000	Valid

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kompetensi Aparatur (X<sub>2</sub>)

Item	Person Corelation	Signifikan	Status
X <sub>1</sub>	0.523	0.001	Valid
X <sub>2</sub>	0.716	0.000	Valid
X <sub>3</sub>	0.700	0.000	Valid
X <sub>4</sub>	0.780	0.000	Valid

X <sub>5</sub>	0.764	0.000	Valid
X <sub>6</sub>	0.599	0.000	Valid
X <sub>7</sub>	0.795	0.000	Valid
X <sub>8</sub>	0.718	0.000	Valid
X <sub>9</sub>	0.754	0.000	Valid

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Tabel 3, menunjukkan variabel Kompetensi Aparatur mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk Kompetensi Aparatur adalah valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X<sub>3</sub>)

Item	Person Corelation	Signifikan	Status
X <sub>1</sub>	0.825	0.001	Valid
X <sub>2</sub>	0.683	0.000	Valid
X <sub>3</sub>	0.790	0.000	Valid
X <sub>4</sub>	0.788	0.000	Valid
X <sub>5</sub>	0.810	0.000	Valid
X <sub>6</sub>	0.767	0.000	Valid
X <sub>7</sub>	0.879	0.000	Valid
X <sub>8</sub>	0.494	0.001	Valid
X <sub>9</sub>	0.841	0.000	Valid

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Tabel 4 di atas, menunjukkan Akuntabilitas mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk Akuntabilitas adalah valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kualitas Informasih laporan Keuangan(Y)

Item	Person Corelation	Signifikan	Status
Y <sub>1</sub>	0.860	0.000	Valid
Y <sub>2</sub>	0.917	0.000	Valid
Y <sub>3</sub>	0.705	0.000	Valid
Y <sub>4</sub>	0.868	0.000	Valid
Y <sub>5</sub>	0.705	0.000	Valid
Y <sub>6</sub>	0.918	0.000	Valid
Y <sub>7</sub>	0.812	0.000	Valid
Y <sub>8</sub>	0.916	0.000	Valid

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Tabel 6, menunjukkan Kualitas Informasi Laporan Keuangan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Maka disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan untuk Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah valid.

**b. Uji Reliabilitas**

Nilai *reliabilitas* dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika ( *ri* ) > 0,6. (Ghozali, 2011). Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas dan Kualitas Informasi laporan Keuangan mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebeih besar dari nilai 0.6, sehingga kuesioner yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel. Hasil uji *reliabilitas* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Koefisien Alpha	Status
1	Penerapan Standar Akuntansi pemerintah	0,864	Reliabel
2	(X <sub>1</sub> )	0,875	Reliabel

3	Kompetensi Aparatur (X <sub>2</sub> )	0,913	Reliabel
4	Akuntabilitas Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	0.939	Reliabel

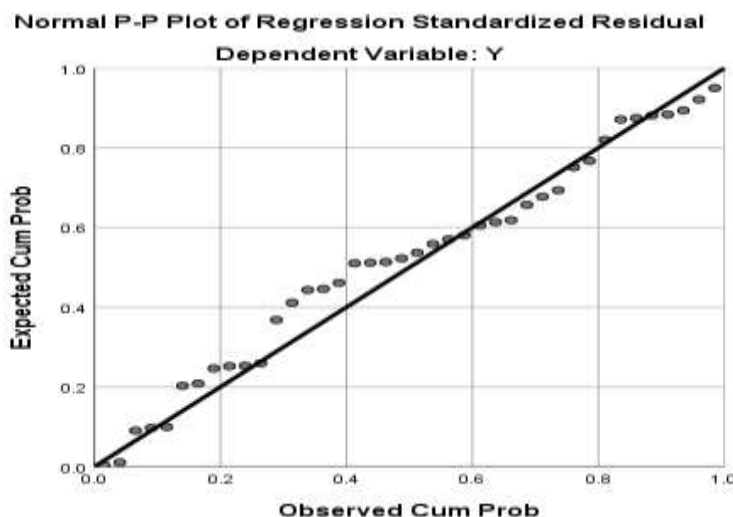
Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan uji reliabilitas pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Penerapan Standar Akuntansi pemerintah sebesar 0,864, Kompetensi Aparatur sebesar 0,875, Akuntabilitas sebesar 0,913 dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebesar 0,939. Sehingga kuesioner yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

**c. Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data normal maka garis akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 2011:161). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, terlihat pada data *ploting* (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah terdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi. Namun ada beberapa peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal masih belum efektif. Untuk itu, harus dilakukan dengan pengeujian *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawa;

Tabel 8. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
<b>N</b>		<b>40</b>
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.99855809
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.052

	Negative	-.116
Test Statistic		.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.192 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Dari Tabel 8, terdapat normalitas, maka residual terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dengan kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data terdistribusi normal, dengan tingkat signifikan 0,192 > 0,05.

**2. Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2011: 107-108). Pengujian Multikolinieritasakan menggunakan *Variance Inflationfactor* (VIF) dengan kriteria yaitu:

- a. Jika angka *tolerance* dibawah 0,10 dan VIF>10 dikatakan terdapat gejala multikolinieritas
- b. Jika angka *tolerance* diatas angka 0,10 dan VIF<10 dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Tolerance	VIF
X1	0.847	1.180
X2	0.845	1.183
X3	0.945	1.059

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10, demikian juga nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan mode regresi, bebas dari gejala Multikolinearitas.

**3. Uji Autokoreasi**

Autokorelasi terjadi apabila gangguan dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai pengganggu periode sebelumnya. Konsekuensi adanya autokorelasi adalah selang keyakinan menjadi besar serta varian dan kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Pengujian dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson* . pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* hasil estimasi. Menurut DW, besarnya koefisien *Durbin Watson* antara 0-4, kalau koefisien sekitar 2, dapat dikatakan tidak korelasi. Namun jika besarnya mendekati nol, maka terdapat autokorelasi positif, dan jika besarnya mendekati 4 maka terdapat autokorelasi negatif. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.10:

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

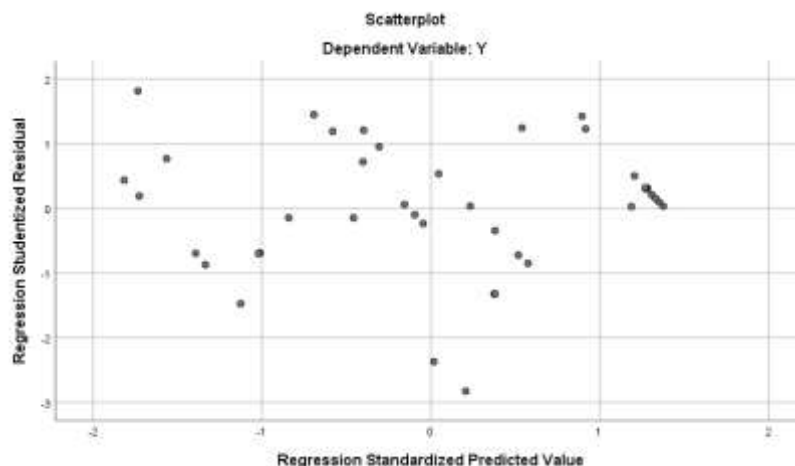
Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 <sup>a</sup>	0.874	0.863	2.080	1.526

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Dari data pengolahan autokorelasi di atas dapat dilihat nilai DW sekitar 1.526. karena angka DW berada diantara -2 dan + 2 yaitu sebesar 1.526, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya gejala autokorelasi positif atau negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada mode regresi.

**4. Uji Heterokedastisitas**

Jika *Scatterplot* menghasilkan titik-titik yang tidak membentuk pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan dibawa angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2006:105). Berikut gambar *Scatterplot* yang dihasilkan model regresi;



Gambar 2. Uji Heterokedasttistas

Dari Gambar 2 di atas dapat terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun ada beberapa peneliti berasumsi bahwa dengan menggunakan gambar menghasilkan titik-titik yang tidak membentuk pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, masih belum efektif. Untuk itu, harus dilakukan dengan pengujian *Glejser*. Hasil uji Heterokedasttistas dengan menggunakan uji *Glejser* dapat dilihat pada gambar 2;

Tabel 11. Uji Statistik Heterokedasttistas

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.897	3.429		2.011	.052
	Total_x1	-.073	.093	-.136	-.781	.440
	Total_x2	-.040	.075	-.095	-.542	.591
	Total_x3	-.047	.039	-.197	-1.192	.241

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Sig > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan mode regresi, bebas dari gejala Heterokedasttistas.

**d. Uji Hipotesis**

Menurut Ghozali (2007:223) penelitian ini menggunakan pendekatan uji interaksi atau sering disebut dengan *moderated regression anaysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus untuk model regresi berganda linier, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan digunakan uji statistik terhadap *output* yang dihasilkan dari persamaan regresi.

**1. Uji Parsial (t)**

Uji persial (t) digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika uji parsial (t) menghasilkan t hitung > t tabel dan nilai signifikan < 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  dirima, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan hasil uji persial (t) untuk melihat penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil pengujiannya dengan menggunakan *SPSS Statistic*, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 12. Uji Statistik Persial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6.822	5.400		-1.263	0.215
X1	0.026	0.147	0.012	0.179	0.859
X2	0.089	0.118	0.049	0.757	0.454
X3	0.940	0.062	0.928	15.220	0.000

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan hasil uji persial (t) sebagai berikut;

- 1) Hipotesis  $H_1$  menyatakan bahwa ada pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian *SPSS Statistic* uji persial (t) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah bernilai 0,179 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,859 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- 2) Hipotesis  $H_2$  menyatakan bahwa ada pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian *SPSS Statistic* uji persial (t) menunjukkan kompetensi aparatur bernilai 0,757 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
- 3) Hipotesis  $H_3$  menyatakan bahwa ada pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Dari hasil pengujian *SPSS Statistic* uji persial (t) menunjukkan akuntabilitas bernilai 15,220 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## 2. Uji Simultan (f)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hubungan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai f hitung dan signifikannya. Uji f dapat cari dengan melihat f hitung dari tabel *Anova output SPSS versi 26 for windows*, selain itu juga membandingkan hasil dari *probabillitas value*.

Jika *probabillitas value* > 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan jika *probabillitas value* < 0,05 maka  $H_a$  diterima. Hasil perhitungan *Statistic* pada pengujian simultan dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 13. Uji Simultan (f)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1076.625	3	358.875	82.937	.000b
Residual	155.775	36	4.327		
Total	1232.4	39			

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 13, uji simultan (F) nilai F hitung sebesar 82.937 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) yang berarti, penerapan standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ), kompetensi aparatur

(X<sub>2</sub>) dan akuntabilitas (X<sub>3</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

**3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Nilai *Adjusted R2* ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (*Adjusted R2* = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila *Adjusted R2* = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila *Adjusted R2* = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi (Ghozali, 2011).

Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.935 <sup>a</sup>	0.874	0.863	2.080	1.526

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2020

Berdasarkan Tabel 14 di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,863 artinya variabel terikat dapat dijelaskan variabel bebas sebesar 86,3%, dan sisanya 13,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**3.2. Pembahasan Hasil Penelitian**

**3.2.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi laporan keuangan**

Standar akuntansi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan tata kelola keuangan negara. Banyak pihak membutuhkan standar akuntansi pemerintah, di antaranya penyajian laporan keuangan, auditor, pengguna laporan keuangan, akademisi, dan organisasi profesi akuntansi. Agar standar akuntansi memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi maka standar akuntansi harus disusun oleh badan penyusun standar yang independen. Di Indonesia badan penyusun standar akuntansi adalah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk menyusun standar akuntansi sektor bisnis dan sosial serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk standar akuntansi pemerintahan. Pada tingkat internasional terhadap *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) untuk sektor publik. Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki standar akuntansi pemerintahan dalam bentuk PP No. 71 Tahun 2010 pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia mengacu pada IPSAS dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Standar akuntansi pemerintah bukan sesuatu yang statis tetapi akan terus berkembang mengikuti perkembangan praktik akuntansi dan teori yang ada (Mahmudi;2018:307).

Dari hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan bahwa hipotesis H<sub>1</sub> menyatakan bahwa ada pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yang artinya H<sub>1</sub> ditolak. Berdasarkan identifikasi masalah masih terdapat kelemahan atau kurangnya pemahaman terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk diberbagai pemerintah daerah terus terjadi dan berlanjut.

Namun jika dilihat dari tanggapan responden mengenai variabel penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Ternate masih belum optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Ali Fikri Biana, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

### **3.2.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Setiap organisasi membutuhkan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen tersebut diperlukan untuk menjamin dikelolanya organisasi secara efisien dan efektif. Dalam kebanyakan organisasi yang sudah besar, fungsi pengendalian manajemen sudah tersistem dengan baik. Desain sistem pengendalian manajemen perlu dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Sistem pengendalian manajemen yang komprehensif meliputi pengintegrasian struktur dan budaya atau perilaku organisasi, memperhatikan aspek internal dan eksternal, aspek pengendalian formal dan informal, pengendalian kinerja keuangan dan nonkeuangan. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi manajemen kinerja terpadu karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas tersebut merupakan dasar untuk melakukan penilaian kinerja. Oleh karena itu, dalam mendesain sistem pengukuran kinerja, terlebih dahulu harus dipahami desain sistem pengendalian manajemen organisasi (Mahmudi;2015:81).

Hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan bahwa Hipotesis H<sub>2</sub> menyatakan bahwa ada pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga H<sub>2</sub> ditolak.

Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personal, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap) dari aspek kualitas penataan personal.

Hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, karena terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **3.2.3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.**

Akuntansi sektor publik memiliki peran sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat *powerful* untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun informasi keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik (Mahmudi;2015:11).

Dari hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan bahwa hipotesis H<sub>3</sub> menyatakan bahwa ada pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga H<sub>3</sub> diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan daerah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara baik oleh Pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Natak Riswanto (2016) menunjukkan bahwa: "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,

hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.”

### **3.2.4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor bisnis. Bentuk laporan keuangan sektor publik lebih luas dibandingkan sektor bisnis. Laporan keuangan sektor publik meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan sektor publik dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan antara lain melalui analisisvarians, analisis pertumbuhan, analisis rasio keuangan, analisis regresi, trend, dan prediksi (Mahmudi;2018:172).

Berdasarkan tabel 4.13, uji simultan (F) nilai F hitung sebesar 82.937 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) yang berarti, penerapan standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ), kompetensi aparatur ( $X_2$ ) dan akuntabilitas ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dari hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah bernilai 0,179 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,859 lebih besar dari  $\alpha =0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan kompetensi aparatur bernilai 0,757 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454 lebih besar dari  $\alpha =0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hasil pengujian *SPSS Statistik* uji persial (t) menunjukkan akuntabilitas bernilai 15,220 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha =0,05$ . Hasil uji persial (t) pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yang artinya  $H_1$  ditolak. Hal ini masih terdapat kelemahan atau kurangnya pemahaman terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk diberbagai pemerintah daerah terus terjadi dan berlanjut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Ali Fikri Biana, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
2. Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga  $H_2$  ditolak. Artinya yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, karena terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Sehingga menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga  $H_3$  diterima, Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan daerah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara baik oleh Pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Natak Riswanto (2016) menunjukkan bahwa: “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas yang

dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah”.

4. Penerapan standar akuntansi pemerintah ( $X_1$ ), kompetensi aparatur ( $X_2$ ) dan akuntabilitas ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini mendukung penelitiannya Mia Oktarina, ddk (2016) dan Natak Riswanto (2016) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi laporan keuangan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas dan Pemerintah Kota Ternate

- a. Bagi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Pemerintah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Karena masih terdapat kelemahan atau kurangnya pemahaman terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sehingga menyebabkan permasalahan kualitas laporan keuangan yang buruk diberbagai pemerintah daerah terus terjadi dan berlanjut.
- b. Pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya menekankan pada tujuan yang ingin dicapai, bukan pada unsur-unsur yang dibentuk. Karena terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan daerah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara baik oleh Pemerintah daerah. Pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengenai penghimpunan sumber-sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.
- d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak yang akan melakukan penelitian yang sama. Dalam melakukan penelitian dibidang Akuntansi Pemerintah masih banyak ruang kosong khususnya pada bidang akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu masih banyak kajian yang cukup menarik dan menantang dibidang akuntansi sektor publik. Disarankan untuk menambah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya dan kemudian dapat dibandingkan hasil penelitian penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika. Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal Stie Semarang, VOL 5, NO 3, Edisi Oktober 2013 (ISSN : 2252-7826)*.

- Afrina, Dina. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia.*
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
- Andini dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1 Vol. 24No. 1 (2015).*
- Aruan N, (2003). "*Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur*".
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Emilda Ihsanti. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Kab.Lima Puluh Kota.*
- Fitriadi, Maikel. 2013. Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada Kota Pekanbaru). *Skripsi. Universitas Riau.*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi, Egit. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (*Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa*) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kusumah, Arif Andi. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya). Tasikmalaya. FE Universitas Siliwangi.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.*
- \_\_\_\_\_ 2018. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.*
- Mardiasmo 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.*
- \_\_\_\_\_ 2004. *Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.*
- Nordiawan, Deddy dkk.2008. *Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.*
- Oktania, Mia, dkk.2016. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi.Nomor 2.Volume 2. Maret 2016.*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2001, tentang *Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- \_\_\_\_ Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_ Nomor 56 tahun 2005, tentang Informasi Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009.
- Riswanto, Natak. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
- Riantiarno, Azlina, 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal online*. Universitas Riau.
- Rahmat. "Pengenalan SIMDA". 20 Februari 2015. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/bpkp> diakses pada 13 Mei 2017 Pukul 13:43 WITA.
- Rico Simanjuntak. "Pengertian SIMDA Keuangan". 8 November 2016. <https://www.google.com/search?q=jurnal+pengertian+SIMDA+Keuangan> diakses pada 20 Mei 2017 Pukul 14:50 WITA.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Sukmaningrum T, (2012). *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi dipublikasi.
- Triwardana, Dhedy. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi*. No 1. Volume 4. Februari 2017.
- Udiyanti, Atmadja dan Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2 No 1 Tahun 2014.
- Umar, Husen. 2018. *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. Rajagrafindo Pusada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Permendagri 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005.
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37